



PENYULUHAN PENGEMBANGAN PELAPORAN BUMDES UNTUK MENDUKUNG PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERKELANJUTAN PADA KELOMPOK BUMDES YANG TERGABUNG DALAM ASOSIASI PEMERINTAH DESA SELURUH INDONESIA (APDESI) DI KECAMATAN WOLASI SULAWESI TENGGARA

Nur Asni^{1*}, Andi Basru Wawo², Husin³, Mulyati Akib⁴, Tuti Darmawati⁵, Emillia Nurdin⁶, Nitri Mirosea⁷, Kurnia Cahya Lestari⁸, Sarah Andini⁹, Putriana Aksa¹⁰

^{1,2,3,4,5,6,7,9,10}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo

⁸Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Qomaruddin

Email: nur.asni@uho.ac.id¹, andi.basruwawo@yahoo.co.id², husin@uho.ac.id³, mulyatiakib.feb@uho.ac.id⁴, tuti_balaka@yahoo.co.id⁵, emillia.nurdin@uho.ac.id⁶, nitri.mirosea@uho.ac.id⁷, kurniacahyalestari@uqgresik.ac.id⁸, sarahandini1901@gmail.com⁹, putianaksa@gmail.com¹⁰

Abstract

Sustainable village development (village SDGs) is a form of implementation and contribution of villages in achieving national SDGs. BUMDes, as a business entity in the village area, has a significant role in village SDGs. Community Service (PKM) activities focus on literacy in managing sustainable BUMDes businesses by orienting themselves towards profit aspects and considering the village's social and environmental aspects. Therefore, PKM aims to increase knowledge of sustainability reports as a source of information in BUMDes' strategic decision-making. Participants in this PKM activity involved village heads and BUMDes administrators in 6 (six) villages that are members of the Association of Indonesian Village Governments (APDESI) in Wolasi District, Southeast Sulawesi Province. Six villages were implemented, focusing on Wolasi District, South Konawe Regency, involving 20 BUMDes administrators. The PKM implementation method uses three approaches, namely active presentations, discussions, and exercises. The results of the PKM activity showed the participants' enthusiasm for actively participating in each activity session. The evaluation results also demonstrated increased participants' understanding of aspects of village sustainability in general and Village-Owned Enterprises (BUMDes) in particular, as well as the role of sustainability reports as a critical source of information in supporting sustainable decision-making. The results of the PKM activities are expected to serve as a reference for the sustainable development of BUMDes managers who are members of APDESI in Wolasi District.

Keywords: Sustainability Reporting; Sustainable Decision Making; BUMDes; APDESI; Wolasi District

Abstrak

Pembangunan desa berkelanjutan (SDGs desa) merupakan wujud implementasi dan kontribusi desa dalam mencapai SDGs nasional. BUMDes sebagai entitas bisnis dalam wilayah desa memiliki peran yang signifikan dalam SDGs desa. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) difokuskan pada literasi pengelolaan usaha BUMDes yang berkelanjutan dengan tidak hanya berorientasi pada aspek keuntungan tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan desa. Olehnya tujuan PKM diarahkan pada peningkatan pengetahuan atas laporan keberlanjutan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan strategis BUMDes. Peserta kegiatan PKM ini melibatkan kepala desa dan pengurus BUMDes di 6 (enam) desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Wolasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Terdapat 6 Desa dilaksanakan berfokus di Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan dengan melibatkan peserta sebanyak 20 orang pengurus BUMDes. Metode pelaksanaan PKM menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu presentasi aktif, diskusi dan latihan. Hasil kegiatan PKM menunjukkan antusiasme peserta dengan berpartisipasi aktif pada setiap sesi kegiatan. Hasil evaluasi juga menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terkait aspek-aspek keberlanjutan desa secara umum dan BUMDes secara khusus serta peran laporan keberlanjutan sebagai sumber informasi penting dalam mendukung pengambilan keputusan berkelanjutan. Hasil kegiatan PKM diharapkan menjadi rujukan dalam pengembangan berkelanjutan para pengelola BUMDes yang tergabung dalam APDESI di Kecamatan Wolasi.

Kata kunci: Pelaporan Keberlanjutan, Pengambilan Keputusan Berkelanjutan, BUMDes, APDESI, Kecamatan Wolasi

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat desa merupakan komitmen Indonesia dalam berpartisipasi mewujudkan agenda global SDGs yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Sebagai tonggak penting dalam pembangunan Indonesia dengan porsi hampir 80% dalam wilayah Indonesia (Putra and Yuliarso, 2024), peran desa dalam mendorong 17 tujuan SDGs Indonesia bertujuan untuk menghasilkan desa yang lebih inklusif, berkelanjutan dan mampu menghadapi tantangan masa depan dengan tetap memperhatikan aspek kearifan lokal dan keunikan desa itu sendiri. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah desa perlu menerapkan strategi pembangunan yang mendukung pencapaian 17 tujuan SDGs Desa. SDGs Desa adalah langkah nyata untuk memajukan negara, yang diselenggarakan berdasarkan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 mengenai pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara nasional atau SDGs Nasional (Humanika, Setiawan, 2023, Maharani and Abubakar, 2024). Keunikan SDGs desa diharapkan dapat membawa desa menuju desa dinamis dan budaya desa adaptif (Ramadhan, et al., 2024).

Salah satu entitas strategis dalam pembangunan desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah motor penggerak ekonomi desa dalam memberdayakan segala sumberdaya desa untuk memberikan nilai tambah bagi desa (Widjaja et al, 2024, Sabon et al, 2024). Jenis usaha BUMDes diantaranya adalah bisnis sosial, keuangan, bisnis penyewaan, broker, perdagangan, usaha bersama dan kontraktor (Fernandes et al, 2023). Optimalisasi pengelolaan BUMDes tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, tetapi juga mendorong kemandirian desa secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kontribusi BUMDes dalam pencapaian SDGs di level desa memiliki dampak yang signifikan pada pengembangan dan pertumbuhan ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kemitraan dan inovasi desa (Firdaus et al, 2024). Olehnya, BUMDes sebagai entitas bisnis yang dikelola dan dimiliki oleh masyarakat desa memerlukan pelaporan yang lebih komprehensif dalam menjalankan keputusan berkelanjutan sehingga dapat mendukung kinerja keberlanjutan desa.

Pengembangan pelaporan BUMDes tidak hanya terbatas pada bagaimana melaksanakan pelaporan keuangan yang sudah dilaksanakan dalam mempertanggungjawabkan setiap aktivitas yang telah dilakukan. BUMDes dalam kerangka SDGs desa juga perlu menyiapkan laporan yang bersifat non keuangan untuk mengakomodasi setiap aktivitas yang berkaitan sosial dan lingkungan. Pelaporan yang lebih komprehensif diharapkan dapat digunakan untuk merencanakan aktivitas dimasa yang akan datang.

Laporan keberlanjutan merupakan bentuk pelaporan yang bersifat komprehensif untuk memberikan informasi yang relevan terkait dengan aktivitas ekonomi, sosial dan lingkungan. Laporan keberlanjutan dapat menjadi alat yang merepresentasikan akuntabilitas dari suatu entitas kepada pemangku kepentingan terhadap tiga aspek penting yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial [9]. Sama halnya dengan perusahaan korporasi, format laporan keberlanjutan di sektor pemerintahan juga dapat mengikuti standar *Global Reporting Initiative* (GRI). Permasalahan disektor pemerintahan adalah masih rendahnya pengungkapan dan pelaporan aktivitas lingkungan sosial dan lingkungan dalam aktivitas ekonomi pemerintah, sehingga para pemangku kepentingan belum mendapatkan informasi keberlanjutan yang lengkap (Amalia and Firmansyah, 2024). Sejalan dengan hal ini, peraturan yang mewajibkan pelaporan keberlanjutan masih berfokus pada sektor swasta sehingga mengakibatkan implementasi pelaporan keberlanjutan di sektor publik Indonesia tampaknya menunjukkan masih sedikit instansi yang melakukan pelaporan keberlanjutan dibandingkan dengan sektor swasta (Rahmasari and Bandiyono, 2025).

Kecamatan Wolasi merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.017 jiwa, terdiri atas 3.038 laki-laki dan 2.979 perempuan dengan sekitar 1.595 Kepala Keluarga (KK). Luas wilayahnya mencapai 160,28 km², dengan kepadatan penduduk rata-rata 38 jiwa per km² (Data BPS, 2023). Terdapat 7 desa di kecamatan ini antara Desa Amoito Jaya, Desa Mata Wolasi, Desa Wolasi, Desa Aoma, Desa Leleka, Desa Ranowila, dan Desa Aunupe di mana sebagian besar telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), meskipun belum semuanya aktif secara optimal

Pengelolaan BUMDes dalam lingkup Kecamatan Wolasi yang aktif maupun yang masih berkembang belum sepenuhnya berjalan optimal. Pemahaman dan implementasi peran BUMDes dalam mendukung SDGs dan pelaporan aktivitas BUMDes masih relatif terbatas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya literasi SDGs di tingkat desa, keterbatasan kapasitas pengelola BUMDes, kurangnya integrasi program BUMDes dengan prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam penyusunan laporan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, penyuluhan tentang pengembangan pelaporan bumdes untuk mendukung pengambilan keputusan berkelanjutan pada kelompok bumdes yang tergabung dalam asosiasi pemerintah desa seluruh indonesia (APDESI) di Kecamatan Wolasi Sulawesi Tenggara menjadi sangat penting dan relevan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaporan aktivitas BUMDes baik yang berkaitan aktivitas ekonomi, sosial dan lingkungannya kepada para pengelola BUMDes dan aparat desa untuk mendukung pengambilan keputusan yang berkelanjutan. Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan para pengelola BUMDes di Kecamatan Wolasi mampu mengembangkan program kerja dengan berlandaskan pada laporan keberlanjutan sehingga dapat

menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sosial, pelestarian lingkungan, serta penguatan kapasitas kelembagaan desa. Penerapan pelaporan keberlanjutan diharapkan dapat memacu pertumbuhan BUMDes yang berkelanjutan, berlandaskan pada etika bisnis (Ferina et al, 2025).

Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, kegiatan ini juga diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif bahwa pencapaian tujuan pembangunan global seperti SDGs bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau lembaga internasional, tetapi juga merupakan bagian dari peran aktif desa-desa di Indonesia. Keberadaan bumdes di harapkan dapat mendukung kualitas ekonomi, sosial dan lingkungan desa melalui peningkatan kapasitas seluruh *stakeholder* desa baik aparat desa, pengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat desa tentang pengelolaan bumdes secara berkelanjutan (Yuliarti and Wulandari, 2023). Olehnya BUMDes memerlukan pelaporan yang lebih komprehensif untuk mengambil keputusan-keputusan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian SDGs desa

METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Metode pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dirancang secara sistematis, partisipatif, dan kontekstual agar dapat menjangkau berbagai kalangan yang berkaitan langsung dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pelaksanaannya dibagi ke dalam tiga tahap utama, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan penyuluhan, dan evaluasi serta tindak lanjut.

1. Tahap persiapan merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam menjamin kelancaran kegiatan. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan meliputi:
2. Koordinasi dengan pemangku kepentingan lokal, termasuk pemerintah desa dan pengurus BUMDes. Koordinasi ini bertujuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan, menjalin komunikasi awal, serta membangun dukungan dan keterlibatan masyarakat lokal sejak tahap perencanaan.
3. Penyusunan materi penyuluhan dan modul edukatif, yang akan disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi peserta dan potensi desa. Materi ini akan mencakup topik-topik strategis seputar manajemen BUMDes, prinsip dasar SDGs, pelaporan aktivitas keuangan dan non keuangan yang membantu dalam pengambilan keputusan yang mendukung pembangunan desa berkelanjutan.
4. Identifikasi peserta dan kebutuhan pelatihan, dengan melibatkan pihak desa untuk memilih peserta yang relevan seperti pengurus BUMDes, aparat desa, atau perwakilan masyarakat. Selain itu, dilakukan penentuan lokasi penyuluhan dan penyiapan logistik seperti alat presentasi, bahan cetak, serta konsumsi.
5. Tahap ini juga mencakup penyebaran undangan dan konfirmasi kehadiran peserta, agar persiapan berjalan sesuai dengan target waktu dan kebutuhan yang direncanakan

Tahap pelaksanaan kegiatan merupakan kegiatan inti yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penguatan kapasitas peserta mengenai peran strategis BUMDes dalam mendukung pencapaian SDGs. Metode yang digunakan antara lain:

1. Presentasi interaktif, yaitu pemaparan materi oleh narasumber dengan pendekatan dua arah yang melibatkan peserta dalam diskusi aktif, tanya jawab, dan penyampaian pendapat.
2. Diskusi kelompok kecil, digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman peserta, tantangan lokal, serta potensi kolaborasi dalam pengelolaan BUMDes berbasis pembangunan berkelanjutan dan pelaporan untuk keputusan yang berkelanjutan.
3. Studi kasus, yaitu pengenalan praktik baik dari desa-desa lain yang telah berhasil mengembangkan BUMDes dengan pendekatan SDGs. Peserta diajak untuk menganalisis kunci keberhasilan dan strategi implementasi yang dapat ditiru dan disesuaikan dengan kondisi desa masing-masing.

Ruang lingkup materi yang disampaikan meliputi:

1. Pemahaman tentang konsep dasar dan regulasi BUMDes, termasuk dasar hukum, struktur kelembagaan, dan tanggung jawab pengelola.
2. Pengenalan Tujuan dan prinsip SDGs serta SDGs Desa, agar peserta memahami bahwa pembangunan desa tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga mencakup sosial, lingkungan, dan tata kelola yang berkelanjutan.
3. Pembahasan mengenai integrasi program BUMDes ke dalam pencapaian SDGs, misalnya melalui program ekonomi kreatif, pengelolaan limbah, pelatihan kewirausahaan perempuan, atau penyediaan akses layanan dasar berbasis desa.
4. Pembahasan mengenai pengembangan pelaporan yang dapat dilakukan oleh BUMDes untuk mendukung pengambilan keputusan yang berkelanjutan.
5. Penyampaian praktik baik (*best practices*) dari wilayah lain, untuk memberikan inspirasi dan dorongan bagi peserta agar bisa menerapkan strategi serupa.

Tahap evaluasi dan tindak lanjut Setelah pelaksanaan penyuluhan, kegiatan dilanjutkan dengan evaluasi dan rencana tindak lanjut guna menilai efektivitas penyuluhan dan mendorong keberlanjutan aksi peserta. Tahapan ini mencakup:

1. Evaluasi pemahaman peserta, dilakukan melalui kuisioner, tanya jawab, atau diskusi terbuka yang bertujuan untuk mengukur pemahaman dan tanggapan peserta terhadap materi yang telah disampaikan.
2. Perumusan rencana aksi sederhana, di mana peserta diajak menyusun langkah-langkah konkret yang bisa segera diimplementasikan di desa masing-masing, misalnya inovasi produk BUMDes, penguatan kapasitas SDM, atau pengembangan program berbasis lingkungan.
3. Penyusunan laporan dokumentatif kegiatan, berupa laporan naratif, foto, video, dan notulen diskusi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi internal dan publikasi kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pengelola BUMDes di Kecamatan Wolasi yaitu, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola usaha berbasis prinsip keberlanjutan dan belum optimalnya peran BUMDes sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat desa. Dengan demikian perlunya dilakukan Penyuluhan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mendorong Pencapaian Sustainable Development Goals di Kecamatan Wolasi.

Pelaksanaan kegiatan PKM pada tahap persiapan dirangkum dalam tabel 1 yang memberikan informasi jumlah BUMDes di Kecamatan Wolasi sebanyak 6 (enam) unit yang tersebar di 6 (enam) desa yaitu desa Mata Wolasi, Wolasi, Aoma, Leleka, Ranowila dan Aunupe. Hasil koordinasi dengan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Kecamatan Wolasi bahwa Desa Mata Wolasi, Desa Wolasi dan Desa Aunupe masing-masing memiliki usaha BUMDes yang sama yaitu, usaha sewa kursi dan tenda. Selain itu, Desa Aoma memiliki usaha BUMDes yaitu, usaha penggemukan sapi. Sementara itu, Desa Leleka dan Ranowila memiliki usaha BUMDes yang juga sama yaitu simpan pinjam.

Tabel 1. Daftar BUMDes di Kecamatan Wolasi

No	Nama Desa	Nama BUMDes	Usaha BUMDes
1	Mata Wolasi	Cipta Mandiri	Sewa Kursi dan Tenda
2	Wolasi	Popalia	Sewa Kursi dan Tenda
3	Aoma	Mendidoha	Penggemukan Sapi
4	Leleka	Wulele	Simpan pinjam
5	Ranowila	Sumber Harapan	Simpan pinjam
6	Aunupe	Terang Jaya	Sewa Kursi dan Tenda

Sumber: APDESI Kecamatan Wolasi, 2025

Pelaksanaan Kegiatan PKM dihadiri oleh peserta yang terdiri dari para Kepala Desa (Kades) dan pelaku atau pengelola BUMDes di Kecamatan Wolasi. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari. Gambar 1 menunjukkan informasi bagian dari rangkaian kegiatan PKM yang dibawakan oleh para Dosen.



Gambar 1. Persiapan menuju Lokasi PKM bersama Mahasiswa

Gambar 2 menunjukkan pemaparan materi SDGs desa dan pentingnya laporan keberlanjutan bagi entitas desa.



Gambar 2. Pemaparan Materi PKM oleh Tim Dosen

Gambar 3 memberikan informasi terkait dengan gambaran materi yang diberikan untuk memberikan pemahaman kepada peserta diantaranya mengenai Overview SDGs pada level desa, keterlibatan pemangku kepentingan, peran BUMDes dalam SDGs dan Pelaporan Keberlanjutan.



Gambar 3. Materi PKM

Kegiatan PKM dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi setelah pemaparan materi, Kegiatan tanya-jawab dan diskusi ini bertujuan agar terjadi komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta.

Pelaksanaan evaluasi kepada peserta ditunjukkan pada gambar 4. Evaluasi dilakukan untuk mendapatkan informasi tingkat pemahaman peserta atas materi yang diberikan dan tingkat keberhasilan kegiatan PKM.



Gambar 4. Evaluasi PKM

Bentuk evaluasi yang diberikan adalah menjawab isian akuntansi BUMDes dan identifikasi aktivitas sosial dan lingkungan di lingkungan BUMDes yang dikelola oleh peserta. Indikator evaluasi diukur dengan menggunakan skor nilai dengan range 0 – 100. Hasil evaluasi menunjukkan rata-rata peserta mampu menjawab isian dengan skor nilai 70, yang menunjukkan bahwa kemampuan peserta memahami materi cukup baik.

KESIMPULAN

Kesimpulan pelaksanaan kegiatan PKM dengan tema Penyuluhan Pengembangan Pelaporan BUMdes untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Berkelanjutan pada Kelompok BUMdes yang Tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Kecamatan Wolasi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan ini bertujuan yaitu (a) memberikan pemahaman atas tantangan keberlanjutan BUMDes dari 3 (tiga) aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kepada pengelola BUMDes sehingga dapat mendukung pengembangan dan kontribusi BUMDes terhadap pelaksanaan SDGs pada level desa; (b) meningkatkan kemampuan pengelola BUMDes menyusun laporan keberlanjutan sebagai laporan yang bersifat komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan yang berkelanjutan.
2. Pelaksanaan kegiatan dianggap sudah cukup efektif yang ditunjukkan dengan partisipasi aktif dan antusiasme sepanjang pemaparan materi berlangsung oleh para peserta. Hasil evaluasi memberikan indikasi bahwa peserta memahami cukup baik atas materi yang telah diberikan.

Saran yang dapat disampaikan terkait kegiatan ini diharapkan para peserta mampu menerapkan

materi yang telah diperoleh untuk mendukung keberlangsungan operasional BUMDes melalui peningkatan mutu laporan keberlanjutan. Implementasi laporan keberlanjutan BUMDes tidak hanya menjadi bagian dari proses peningkatan akuntabilitas BUMDes, tetapi juga merupakan alat strategi pengembangan BUMDes dengan menyediakan informasi yang komprehensif dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Manfaat laporan keberlanjutan Pelaporan keberlanjutan BUMDes diharapkan tidak hanya menjadi sarana akuntabilitas mewujudkan pembangunan desa dan BUMDes yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo yang telah mensupport bantuan dana pengabdian sehingga pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- C. F. W. Sabon, M. Kleden, and S. P. A. Lawalu, "Strategi Keberlanjutan BUMDes Sebagai Upaya Pengelolaan Sumber Daya Yang Baik Di Desa Weranggere Kecamatan Witihama Adonara," *J. Pengabd. Kpd. Masy. Nusant.*, vol. 5, no. 3, pp. 3110–3115, 2024.
- D. M. Ramadhan, N. Nurhayati, I. Khumairoh, and N. P. S.P., "Strategi Pengembangan Bumdes Sebagai Implementasi dari Tujuan Sustainable Development Goals (SDGS) di Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang," *Endogami J. Ilm. Kaji. Antropol.*, vol. 6, no. 1, pp. 101–118, 2022.
- D. Fernandes, P. Lake, E. Daeng, M. R. Lay, B. L. Long, and A. Peni, "Sosialisasi Keberlanjutan BUMDes pada Daerah Perbatasan," *J. Pengabd. Masy. Bangsa*, vol. 1, no. 9, pp. 1868–1879, 2023.
- E. Humanika, A. Trisusilo, and R. F. Setiawan, "Peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Dalam Pencapaian SDGs Desa," *Agrifo*, vol. 8, no. 2, pp. 101–116, 2023.
- H. K. Maharani and R. R. T. Abubakar, "Pembangunan Desa Berkelanjutan," *Matra Pembaruan J. Inov. Kebijak.*, vol. 8, no. 2, pp. 131–144, 2024.
- H. Widjaja, A. Salam, A. Asfahani, and E. A. Setiawan, "Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Membangun Desa Melalui Pengembangan Bumdes," *Community Dev. J. J. Pengabd. Masy.*, vol. 5, no. 5, pp. 10237–10242, 2024.
- I. S. Ferina, Aspahani, A. I. Budiman, and Ike Bayusari, "Sosialisasi Laporan Keuangan Berkelanjutan dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan di Desa Wisata Burai Ogan Ilir," *J. Abdimas Mandiri*, vol. 9, no. 1, pp. 166–174, 2025.
- M. I. Firdaus, R. R. Garis, and A. N. R. Anwar, "Peran BUMDes Dalam Mendukung SDGs di Desa Sindangsari Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis," *Papsel J. Humanit. Policy*, vol. 1, no. 3, pp. 192–207, 2024.
- N. C. Yulianti and D. Wulandari, "Akuntansi lingkungan pada BUMDes Karya Mandiri untuk mewujudkan green accounting," *Proceeding Natl. Conf. Account. Financ.*, vol. 5, pp. 372–380, 2023.
- R. Amalia and A. Firmansyah, "Urgensi Implementasi Laporan Keberlanjutan Pada Sektor Pemerintah," *J. Law, Adm. Soc. Sci.*, vol. 4, no. 3, pp. 452–462, 2024.
- P. S. Rahmasari and A. Bandiyono, "Optimalisasi Pelaporan Keberlanjutan di Sektor Publik Indonesia: Strategi Mitigasi Perubahan Iklim," *J. Ris. Mhs. Akunt.*, vol. 13, no. 1, pp. 50–61, 2025.

586 *Indonesian Journal of Engagement, Community Services, Empowerment and Development*
Vol. 5, No.3, Desember 2025, pp. 577-586
<https://doi.org/10.53067/ijecsed.v5i3.230>

W. E. Putra and M. Z. Yuliarso, "Artikel Review: Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan," *J. Ilmu Pertan. Kelingi*, vol. 4, no. 1, pp. 1–10, 2024.